

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Fitriyanti Awing¹, Nur Syamsiah², Mansyur Suma³, Asni Djamereng⁴

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

*Coreespondence email: fitriyantiawing@gmail.com

Abstrak: Pokok Masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto? Yang kemudian menyajikan substansi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kesejahteraan sosial. Informan Penelitian terdiri atas 1). Ketua Koordinator PKH 2) Pihak Kelurahan 3) KPM 4) PM. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto sudah memberikan dampak positif, hal ini terlihat semakin meningkatnya Kesejahteraan ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh keluarga penerima manfaat, dampak program PKH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH meliputi: kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tujuan program, hambatan dalam pendataan dan ketetapan sasaran penerima manfaat, hambatan dalam keaktifan KPM mengikuti pendampingan PKH. Implikasi penelitian ini pihak kelurahan diharapkan tetap terus meningkatkan kualitas pendampingan kepada KPM bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Bagi keluarga penerima manfaat diharapkan tidak menjadikan bantuan PKH sebagai sumber penghasilan utama yang menimbulkan ketergantungan. Bantuan tersebut sebaiknya dimanfaatkan sebagai stimulus untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH); Pelaksanaan Program; Kesejahteraan Masyarakat; Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Kelurahan Pabiringa.

Abstract: The main problem in this study is to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of beneficiary communities in Pabiringa Village, Binamu District, Jeneponto Regency. The following questions then present the substance of the problem, namely: 1) How successful is the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of the community in Pabiringa Village, Binamu District? 2) What obstacles are faced in implementing the Family Hope Program (PKH) in Pabiringa Village, Binamu District?. This study uses a qualitative research type with a sociological and social welfare approach. The research informants consist of 1) the Head of the PKH Coordinator, 2) the Village Officials, 3) the Beneficiary Families (KPM), and 4) the Beneficiaries. Data were obtained from primary and secondary data through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques were conducted through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the data analysis indicate that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving community

welfare in Pabiringa Village, Binamu District, Jeneponto Regency has had a positive impact. This is evident in the increasing economic welfare of the community, the utilization of Family Hope Program (PKH) assistance by beneficiary families, and the impact of the PKH program on improving community welfare. Obstacles encountered in PKH implementation include: a lack of understanding among some communities regarding the program's objectives, obstacles in data collection and targeting beneficiaries, and obstacles to the active participation of beneficiary families (KPM) in PKH assistance. The implications of this research are that the village government is expected to continue improving the quality of assistance provided to beneficiaries. The local government is expected to use this information as an evaluation tool in formulating more comprehensive poverty alleviation policies. Beneficiary families are expected to avoid using PKH assistance as a primary source of income, which can lead to dependency. This assistance should be utilized as a stimulus to improve the family's quality of life through better financial management.

Keywords: *Family Hope Program; Program Implementation; Community Welfare; Beneficiary Families; Pabiringa Subdistrict.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) sejak tahun 2007.

PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, balita dan anak usia sekolah, atau anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia. Selain memberikan bantuan finansial, PKH juga diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga.

Namun, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program unggulan pemerintah dalam bidang perlindungan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan dirancang tidak hanya sebagai bantuan finansial semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat. Melalui kewajiban yang harus dipenuhi, seperti memastikan anak bersekolah, memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan memperhatikan tumbuh kembang anak, PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dengan demikian, PKH tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Pelaksanaan PKH menjadi salah satu upaya penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan

beberapa permasalahan, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan PKH, keterlambatan pencairan bantuan, serta rendahnya kesadaran sebagian penerima manfaat dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pula kendala dalam proses pendampingan dan pengawasan program yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH di lapangan.

Keberhasilan pelaksanaan PKH tidak hanya diukur dari tersalurnya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi keluarga, meningkatnya akses pendidikan anak, membaiknya kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKH agar dapat diketahui sejauh mana program ini berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto” guna mengetahui pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi PKH di tingkat lokal, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui apakah PKH telah berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan, atau masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Selain aspek implementasi dan dampak program, pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat juga sangat bergantung pada indikator resmi yang digunakan pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diukur melalui pendekatan pengeluaran per kapita per bulan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kelurahan Pabiringa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah maupun pihak terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan kesejahteraan sosial. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pabiringa,

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis kondisi yang terjadi di lapangan, terutama berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan PKH, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian yang meliputi Ketua Koordinator PKH, pihak Kelurahan Pabiringa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta penerima manfaat program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan PKH secara langsung, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, manfaat, serta kendala yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih serta dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antartemuan dapat dipahami dengan lebih jelas. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan informasi yang ditemukan, khususnya mengenai keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terutama kebutuhan pendidikan anak, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang diterima mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga sehingga pendapatan yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya yang lebih produktif.

1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Dari aspek ekonomi, bantuan PKH mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sehingga keluarga memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan kebutuhan pendidikan. Meskipun nominal bantuan belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, keberadaannya memberikan rasa aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa keluarga juga memanfaatkan sebagian bantuan untuk mendukung usaha kecil atau kegiatan ekonomi produktif sehingga secara bertahap dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa PKH berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat apabila dimanfaatkan secara tepat.

Pada aspek pendidikan, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak keluarga penerima manfaat. Orang tua menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian seragam, buku, alat tulis, maupun biaya transportasi. Selain itu, adanya persyaratan kehadiran sekolah dalam PKH mendorong orang tua untuk memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada aspek kesehatan, keberhasilan PKH terlihat dari meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh keluarga penerima manfaat. Ibu hamil lebih rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, balita memperoleh imunisasi dan pemantauan pertumbuhan secara berkala, serta keluarga lebih memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarganya. Pendamping PKH juga berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dengan demikian, tujuan PKH dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat mulai tercapai melalui perubahan perilaku penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua koordinator (PKH) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, diperoleh beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan PKH sebagai berikut.

"Ibu sandra dewi menjelaskan bahwa Keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya kehadiran anak di sekolah, meningkatnya kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan, serta berkurangnya beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar."

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu selaku staf pkh bahwa:

"Secara umum, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan. Beberapa keluarga juga menjadi lebih disiplin dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan memastikan anak-anak tetap bersekolah."

Selain mengurangi beban pengeluaran, beberapa keluarga juga memanfaatkan bantuan PKH sebagai modal pendukung kegiatan ekonomi produktif, seperti usaha

kecil atau perdagangan. Walaupun nominal bantuan tidak sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga, program ini mampu memberikan rasa aman bagi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Dengan demikian, PKH berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam mengelola bantuan yang diterima. Keluarga yang menggunakan bantuan sesuai tujuan program memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan keluarga yang menggunakan bantuan untuk kebutuhan di luar prioritas. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program

2. Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Keluarga Penerima Manfaat

Pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu keluarga penerima manfaat PKH yaitu ibu sina menjelaskan bahwa:

“Manfaat bantuan pkh ini sangat membantu. Sebagai orang tua tentu saya ingin anak-anak tetap sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan adanya bantuan PKH, saya lebih terbantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka, karena biaya pendidikan tidak hanya uang sekolah tetapi juga perlengkapan dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu memanfaatkan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya transportasi, serta memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Pemanfaatan bantuan ini menunjukkan bahwa PKH berperan sebagai bentuk perlindungan sosial yang membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar ketika pendapatan keluarga belum mencukupi.

Seperti yang dijelaskan informan ibu darmawaty selaku pendamping sosial kelurahan pabiringa, bahwa:

“Secara umum, KPM memanfaatkan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi prioritas keluarga, seperti kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut sangat membantu terutama bagi

keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi karena dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu keluarga penerima manfaat PKH yaitu pak abd hamid menjelaskan bahwa:

“Bantuan PKH yang kami terima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bantuan tersebut kami gunakan untuk kebutuhan yang memang menjadi prioritas, seperti membeli kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan anak, serta membantu kebutuhan istri saya yang memiliki keterbatasan. Karena kondisi istri saya membutuhkan perhatian lebih, bantuan tersebut sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga.”

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan PKH tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi pada beberapa keluarga dimanfaatkan secara lebih produktif. Sebagian penerima manfaat berupaya mengelola sisa bantuan untuk mendukung usaha kecil yang telah dimiliki, seperti berdagang makanan, menjual kebutuhan sehari-hari, atau kegiatan ekonomi lainnya yang dapat menambah pendapatan keluarga. Walaupun jumlahnya tidak besar dan tidak semua keluarga melakukannya, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk memanfaatkan bantuan sebagai pendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi secara bertahap.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan oleh Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu telah memberikan manfaat yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang diterima mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar secara lebih layak. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatannya, secara umum bantuan PKH telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan bantuan yang tepat, disertai peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga dan dukungan program pemberdayaan ekonomi, diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas PKH dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Keberhasilan suatu program sosial tidak hanya dilihat dari proses penyaluran bantuan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dalam penelitian ini, dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi, peningkatan akses pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta perubahan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat. Bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Sebelum menerima bantuan PKH, sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang terbatas dan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Setelah menerima bantuan, masyarakat merasa lebih terbantu karena memiliki tambahan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat prioritas.

a. Dampak PKH terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

Salah satu dampak utama dari Program Keluarga Harapan adalah membantu meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diterima memberikan dukungan bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan kesehatan. Meskipun bantuan PKH tidak sepenuhnya mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara langsung, keberadaan program ini memberikan keringanan terhadap beban pengeluaran masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu penerima manfaat PKH yaitu ibu sani menjelaskan bahwa:

“Saya sudah menerima bantuan PKH selama beberapa tahun. Awalnya saya terdaftar sebagai penerima karena kondisi ekonomi keluarga yang memang masih membutuhkan bantuan. Dengan adanya PKH, keluarga kami merasa sangat terbantu karena ada tambahan bantuan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penting dalam keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan PKH sangat membantu terutama bagi keluarga yang memiliki pendapatan rendah dan kebutuhan yang cukup besar. Beberapa keluarga menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan penting lainnya yang sebelumnya sulit dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa PKH memiliki peran sebagai jaring pengaman sosial yang membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Selain itu, bantuan PKH juga membantu keluarga dalam mengatur keuangan rumah tangga secara lebih baik. Masyarakat mulai memahami pentingnya menentukan kebutuhan prioritas, seperti mendahulukan kebutuhan pendidikan dan kesehatan dibandingkan kebutuhan lainnya. Dengan adanya bantuan tersebut, keluarga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk kebutuhan lain yang dapat menunjang kesejahteraan keluarga.

b. Dampak PKH terhadap Peningkatan Pendidikan Anak

Selain memberikan dampak pada aspek ekonomi, PKH juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Salah satu tujuan utama PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan partisipasi pendidikan. Bantuan yang diberikan membantu orang tua memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti pembelian buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan pendidikan lainnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu penerima manfaat PKH yaitu ibu Ratna menjelaskan bahwa:

“Bantuan PKH ini kami gunakan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan anak, terutama kebutuhan sekolah seperti membeli buku, alat tulis, dan perlengkapan sekolah. Selain itu, bantuan juga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari”

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat penerima PKH di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak. Adanya bantuan tersebut membuat orang tua lebih mampu mempertahankan anak-anak mereka agar tetap bersekolah dan mengurangi kemungkinan terjadinya putus sekolah akibat faktor ekonomi.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesadaran orang tua bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki kehidupan keluarga di masa depan. Melalui pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga penerima manfaat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

c. Dampak PKH terhadap Peningkatan Kesehatan Keluarga

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi masyarakat yang sehat akan memberikan kemampuan yang lebih besar bagi keluarga untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), aspek kesehatan menjadi salah satu komponen utama yang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi keluarga miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu penerima manfaat PKH yaitu ibu norma menjelaskan bahwa:

“Bantuan PKH sangat membantu karena bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan kesehatan keluarga. Bantuan tersebut dapat membantu ketika ada kebutuhan untuk berobat, membeli kebutuhan kesehatan, atau biaya lain yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Dengan adanya bantuan ini, kami merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerima manfaat pkh , dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan. Bantuan yang diterima membantu keluarga dalam mengurangi beban biaya yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Selain memberikan bantuan secara ekonomi, PKH juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memperhatikan kesehatan keluarga. Keluarga penerima manfaat menjadi lebih sadar akan pentingnya memanfaatkan fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan ketika diperlukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya dilihat dari bantuan yang diberikan, tetapi juga dari perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, meskipun program ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima manfaat, namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas program. Kendala tersebut muncul baik dari sisi pelaksana program maupun dari sisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adanya kendala dalam pelaksanaan PKH menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Kurangnya Pemahaman Sebagian Masyarakat terhadap Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu adalah masih adanya sebagian masyarakat penerima manfaat yang belum memahami secara menyeluruh tujuan dari program tersebut. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa PKH hanya merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan secara berkala untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Padahal, Program Keluarga Harapan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan yang diberikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan mampu memberikan perubahan dalam kehidupan keluarga penerima manfaat secara bertahap.

Dalam pelaksanaan PKH, pendamping memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat. Pendamping PKH tidak hanya bertugas memastikan bantuan diterima oleh KPM, tetapi juga memberikan edukasi mengenai kewajiban penerima manfaat, pemanfaatan bantuan yang tepat, serta pentingnya memenuhi komponen program seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui kegiatan pertemuan kelompok dan komunikasi secara langsung, pendamping berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat agar bantuan yang diterima dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut dapat memengaruhi cara penerima manfaat dalam menggunakan bantuan yang diterima.

Sebagian besar masyarakat memang telah memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan yang sesuai dengan tujuan program, seperti kebutuhan sekolah anak dan kesehatan keluarga. Namun, karena kondisi ekonomi keluarga yang masih terbatas, beberapa penerima manfaat juga menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak.

Seperti yang dijelaskan informan ibu darmawaty selaku pendamping sosial kelurahan pabiringa, bahwa:

“Secara umum masyarakat sudah mengetahui bahwa PKH merupakan bantuan dari pemerintah untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Namun, masih ada sebagian KPM yang belum memahami tujuan PKH secara keseluruhan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa PKH hanya sebatas bantuan uang yang diterima setiap tahap pencairan, padahal tujuan utama program ini

adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, masih terdapat beberapa penerima manfaat yang perlu diberikan pemahaman secara berulang mengenai fungsi dan tujuan PKH. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa keberhasilan PKH hanya dilihat dari adanya bantuan yang diterima, bukan dari perubahan kondisi keluarga setelah mengikuti program. Padahal, indikator keberhasilan PKH juga dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi pendidikan anak, meningkatnya kesadaran dalam memanfaatkan layanan kesehatan, serta kemampuan keluarga dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

2. Kendala dalam Pendataan dan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat

Pendataan dan ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Keberhasilan suatu program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Data yang akurat akan membantu proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan PKH adalah masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan data penerima manfaat. Data menjadi tantangan tersendiri karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi kurang mampu dapat mengalami peningkatan ekonomi, sementara masyarakat lain yang mengalami kesulitan ekonomi belum tentu langsung masuk sebagai penerima manfaat.

Permasalahan tersebut menyebabkan proses penentuan penerima manfaat membutuhkan pembaruan data secara berkala. Dalam pelaksanaan PKH, pendataan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pendamping PKH, serta masyarakat. Setiap pihak memiliki peran dalam memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Salah satu kendala dalam proses pendataan adalah adanya perubahan kondisi keluarga penerima manfaat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan jumlah anggota keluarga, perubahan pekerjaan, perubahan tingkat pendapatan, perpindahan tempat tinggal, maupun perubahan kondisi sosial lainnya. Apabila perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem pendataan, maka dapat memengaruhi ketepatan sasaran pemberian bantuan.

Seperti yang dijelaskan informan ibu darmawaty selaku pendamping sosial kelurahan pabiringa, bahwa:

“Kendala yang sering ditemukan adalah adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang sebelumnya memenuhi kriteria penerima manfaat, tetapi setelah beberapa waktu mengalami perubahan kondisi. Selain itu, masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum terdata sebagai penerima manfaat.”

Dalam kondisi tertentu, terdapat masyarakat yang masih menerima bantuan meskipun kondisi ekonominya sudah mengalami perubahan. Sebaliknya, terdapat pula

masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa proses pendataan belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

Selain perubahan kondisi masyarakat, kendala lain yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran adalah keterbatasan informasi yang diterima dalam proses pendataan awal. Tidak semua kondisi masyarakat dapat langsung diketahui secara menyeluruh karena pendataan membutuhkan proses verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi yang sesuai mengenai kondisi ekonomi keluarganya.

Pendamping PKH memiliki peran penting dalam membantu mengatasi kendala tersebut. Pendamping tidak hanya bertugas memberikan pendampingan kepada KPM, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap kondisi penerima manfaat di lapangan. Apabila ditemukan adanya perubahan kondisi keluarga penerima manfaat, pendamping dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pihak terkait untuk dilakukan pembaruan data.

Seperti yang dijelaskan informan ibu darmawaty selaku pendamping sosial kelurahan pabiringa, bahwa:

“saya melakukan pemantauan terhadap kondisi KPM, berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memberikan informasi yang sesuai mengenai kondisi keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, pendamping PKH di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dalam proses pemutakhiran data. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat dapat disampaikan dengan baik. Namun, proses pembaruan data masih membutuhkan waktu karena harus melalui beberapa tahapan sebelum perubahan data dapat ditetapkan.

Kendala pendataan juga berkaitan dengan kondisi masyarakat yang terkadang belum memahami pentingnya memberikan informasi yang sesuai. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa apabila memberikan informasi mengenai perubahan kondisi ekonomi, maka bantuan yang diterima akan langsung dihentikan. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan data yang tercatat.

Seperti yang dijelaskan informan Pak Masdar dg sijaya selaku staf kelurahan pabiringa, bahwa:

“Kendala yang sering ditemukan ada perubahan kondisi masyarakat yang terus berubah. Ada masyarakat yang sebelumnya masuk kategori kurang mampu, tetapi kondisi ekonominya mengalami perubahan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum terdata sebagai penerima PKH.”

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya data yang akurat dalam pelaksanaan PKH. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembaruan data bukan bertujuan untuk menghilangkan hak penerima manfaat secara sepihak, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan ketentuan program.

Selain itu, peningkatan koordinasi antara pendamping PKH, pemerintah

kelurahan, dan masyarakat juga menjadi hal yang penting dalam mengatasi kendala pendataan. Dengan adanya kerja sama yang baik, proses verifikasi kondisi masyarakat dapat berjalan lebih efektif sehingga penyaluran bantuan PKH dapat semakin tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu. Kendala tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, proses pembaruan data yang membutuhkan waktu, serta masih adanya keterbatasan informasi mengenai kondisi penerima manfaat.

Meskipun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan melalui koordinasi antara pendamping PKH, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Dengan adanya pembaruan data yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama antar pihak, diharapkan pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif serta mampu mencapai tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran.

3. Kendala dalam Keaktifan Keluarga Penerima Manfaat Mengikuti Pendampingan PKH

Pendampingan merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Keberadaan pendamping PKH tidak hanya bertujuan untuk membantu proses administrasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, arahan, serta penguatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mampu memahami tujuan program dan memanfaatkan bantuan secara tepat. Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kualitas hidup.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan PKH adalah masih adanya sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pendampingan. Keaktifan masyarakat dalam kegiatan pendampingan sangat diperlukan karena keberhasilan PKH tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam mengikuti proses pembinaan yang diberikan oleh pendamping.

Kurangnya keaktifan sebagian KPM dalam kegiatan pendampingan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian besar penerima manfaat memiliki pekerjaan dengan waktu yang tidak tetap, seperti pekerjaan harian, buruh, petani, atau pekerjaan informal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa KPM mengalami kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan mengikuti kegiatan pendampingan PKH.

Seperti yang dijelaskan informan ibu darmawaty selaku pendamping sosial kelurahan pabiringa, bahwa:

“ibu darma menjelaskan sebagian besar KPM sudah mengikuti kegiatan pendampingan, tetapi masih ada beberapa yang kurang aktif. Biasanya kendalanya karena kesibukan pekerjaan, mengurus keluarga, atau ada keperluan lain sehingga tidak selalu bisa hadir dalam setiap kegiatan.”

Selain faktor pekerjaan, kondisi keluarga juga dapat menjadi penyebab kurang aktifnya sebagian penerima manfaat. Beberapa KPM memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, merawat anak, atau menjaga anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi tersebut terkadang membuat mereka tidak dapat hadir dalam setiap kegiatan pendampingan yang dilaksanakan.

Faktor lain yang memengaruhi keaktifan KPM adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari kegiatan pendampingan. Sebagian penerima manfaat masih beranggapan bahwa tujuan utama PKH hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial, sehingga kegiatan pertemuan atau pendampingan belum dianggap sebagai bagian penting dari program. Padahal, kegiatan pendampingan memiliki peran besar dalam membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, pendamping PKH di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam mengikuti kegiatan pendampingan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan informasi secara langsung kepada KPM mengenai jadwal kegiatan serta menjelaskan pentingnya mengikuti pendampingan. Pendamping juga melakukan pendekatan secara personal kepada keluarga yang kurang aktif agar mereka memahami manfaat dari kegiatan tersebut.

Seperti yang dijelaskan informan ibu darmawaty selaku pendamping sosial kelurahan pabiringa, bahwa:

“Dampaknya ialah informasi mengenai program terkadang tidak diterima secara maksimal oleh KPM. Padahal dalam pendampingan diberikan pemahaman tentang pemanfaatan bantuan, pendidikan, kesehatan, serta kewajiban sebagai penerima manfaat.”

Seperti yang dijelaskan informan Pak Masdar dg sijaya selaku staf kelurahan pabiringa, bahwa:

“Pak Masdar dg sijaya menjelaskan Penyebabnya lebih banyak karena faktor kesibukan masyarakat. Sebagian penerima manfaat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga terkadang sulit menyesuaikan waktu dengan jadwal pendampingan. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa pendampingan merupakan bagian penting dari program PKH.”

Selain itu, pendamping PKH juga berusaha menyesuaikan metode penyampaian informasi dengan kondisi masyarakat. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan kelompok, tetapi juga melalui komunikasi langsung ketika pendamping melakukan kunjungan kepada KPM. Cara tersebut dilakukan agar informasi mengenai program tetap dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk menghadiri pertemuan.

Kurangnya keaktifan KPM dalam kegiatan pendampingan dapat berdampak terhadap kurang optimalnya pencapaian tujuan PKH. Masyarakat yang jarang mengikuti pendampingan berpotensi kurang mendapatkan informasi mengenai perkembangan program, kewajiban sebagai penerima manfaat, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada bantuan yang diterima tanpa memahami tujuan jangka panjang program.

Namun, kurangnya keaktifan sebagian KPM tidak sepenuhnya menunjukkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap program. Kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pekerjaan, dan keadaan keluarga yang membuat sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengikuti kegiatan secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel agar kegiatan pendampingan dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

Peningkatan keaktifan KPM juga membutuhkan kerja sama antara pendamping PKH, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Pemerintah kelurahan dapat membantu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, sedangkan pendamping PKH dapat terus memberikan motivasi dan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam program.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam keaktifan Keluarga Penerima Manfaat mengikuti pendampingan PKH di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesibukan pekerjaan, kondisi keluarga, keterbatasan waktu, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendampingan. Meskipun demikian, pendamping PKH telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komunikasi, sosialisasi, dan pendekatan langsung kepada KPM.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa berbagai kendala dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu bukan menjadi hambatan yang menyebabkan program tidak berjalan, tetapi menjadi tantangan yang perlu terus diperbaiki. Adanya koordinasi antara pendamping PKH, pemerintah kelurahan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan program.

Dengan adanya peningkatan sosialisasi, perbaikan pendataan, penguatan pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat, Program Keluarga Harapan diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penerima manfaat. Keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya akses pendidikan, kesehatan yang lebih baik, serta kemampuan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi kendala pelaksanaan PKH di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah sebagai penyelenggara program, pendamping sebagai pelaksana di lapangan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat harus memiliki peran aktif agar tujuan utama PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Mengacu pada seluruh rangkaian temuan dan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka intisari penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin kesimpulan utama sebagai berikut:

Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang diterima mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan akses anak terhadap pendidikan, meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang.

Peran pendamping PKH dalam pelaksanaan program dapat dikatakan cukup baik. Pendamping tidak hanya bertugas melakukan verifikasi data dan memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memberikan motivasi, edukasi, serta pembinaan kepada keluarga penerima manfaat. Pendamping menjadi pihak yang membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan program. Meskipun demikian, efektivitas pendampingan masih dapat ditingkatkan melalui dukungan sarana, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kapasitas pendamping agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Al-Qur'an. (n.d.). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Konsep dan Definisi Kemiskinan, BPS Republik Indonesia, 2023,
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (2021). Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Gentara, R., Rachman, R., & Suprianto, S. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Hidayat, A. A., Bai'ul Hak, M., & Dzul Fadlli, M. (2025). Analisis Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif Islam. Jurnal Lentera.
- Jayanti, W., & Novianty, R. (2022). The Influence of the Family Hope Program (PKH) Against Poverty Alleviation in Islamic Economic Perspective. Islamic Economic and Business Journal, 3(1),
- Kementerian Agama Republik Indonesia rujukan, Al Qur'an dan Terjemahnya, 2012 jakarta
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Program Keluarga Harapan sebagai bantuan sosial bersyarat. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Novieta, E., Sujianto, & Harapan, T. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA), 17(1).
- Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3
- Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Amzah, 2016), Muhammad Rizaldy Nugraha, 'Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar', Sosio Konsepsia, 13.1 (2023)
- Satriawan, Elan, dkk., Does Conditional Cash Transfer Deliver? Evidence from Indonesia's Program Keluarga Harapan (PKH), Business: Theory and Practice, Vol. 21, No. 1, 2020,

Sumbawati, N. K., Asmini, A., Juliawati, H., & Pamungkas, B. D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(3).

TNP2K, Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017)